

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN PP NOMOR 71
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:
Cristy Soputan¹
Jullie J Sondakh²
Steven Tangkuman³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹cristy_soputan@yahoo.com
²julliesondakh@yahoo.com
³epenzk@yahoo.com

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga *Good Governance* dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap 7 Laporan Keuangan, yaitu Neraca, LRA, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan CALK, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan.

Kata kunci: laporan keuangan, pemerintah, standar akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
ABSTRACT

Governmental Accounting Standards which are accounting principles applied in preparing and presenting financial statements both central and local government. The preparation of financial statements based on the Government Accounting Standards are intended to improve the quality of financial reports, so that the credibility of the financial statements can be increased and can bring transparency and accountability of financial management so that good governance can be achieved. This research aims to determine whether the financial statements are presented in North Sulawesi provincial government is appropriate by Government Regulation No. 71 in 2010. The analytical method used is descriptive in which the data has been collected and then classified and analyzed so that the conclusions can be drawn. The results showed that the presentation of the financial statements of North Sulawesi provincial government fiscal year 2013 is not in accordance with the SAP PP 71 in 2010, but the North Sulawesi provincial government was ready to implement SAP PP 71 in 2010 in fiscal year 2015. North Sulawesi provincial government should have implemented SAP accrual basis in the next year to present the 7th financial statements, the balance sheet, LRA, LAK, statement of changes in SAL, statement of changes in equity, operational reports, and CALK, as well as with the socialization and training to improve the quality of human resources to present the financial reports.

Keywords: financial statements, the governmental, accounting standard

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia saat ini dituntut untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi artinya dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 3 paket Undang-undang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2005 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah, merupakan pedoman dasar bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, yang akhirnya menuntut daerah untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka diperlukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam bidang akuntansi pemerintahan adalah dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga *Good Governance* dapat tercapai. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dinilai tidak stabil. Hal ini bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK selama rentang waktu periode 2011 hingga 2013. Pada tahun 2011 Sulut hanya meraih opini WDP, tahun 2012 Sulut berhasil meraih WTP dan tahun 2013 kembali mendapat opini WDP. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Utara tidak cukup maksimal dan konsisten dalam pengelolaan keuangannya.

Penurunan prestasi pada tahun anggaran 2013 dikarenakan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan tata kelola keuangan daerah yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemprov Sulawesi Utara tidak dilaksanakan secara optimal dalam proses akuntansinya. Permasalahan pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam tata kelola keuangannya menarik peneliti untuk mempelajari salah satu indikator BPK dalam menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, yakni penilaian Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dalam Pasal 1 Ayat Kedua menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Sedangkan *American Accounting Association* dalam Soemarso (2009:3) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Sektor Publik

Nordiawan & Hertianti (2010:4) mendefinisikan organisasi sektor publik sebagai sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya. Mardiasmo (2009:14) menyatakan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Hennley dkk (1990) dalam Harun (2009:54) menyatakan enam tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut.

1. Sebagai petunjuk adanya kepatuhan pelaksanaan tugas
2. Laporan akuntabilitas dan alat evaluasi
3. Sebagai alat perencanaan
4. Petunjuk adanya kelanjutan organisasi
5. Sebagai alat publikasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Hariadi, Restianto, Bawono, 2010:113). SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP menjadi satu-satunya standar pelaksanaan akuntansi pemerintah sehingga upaya pengharmonisan berbagai peraturan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan SAP mutlak dilakukan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 8, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya daerah berdasarkan aktivitas operasi dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan daerah dalam suatu periode tertentu.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 1 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

PSAP No. 01 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

PSAP No. 02 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PSAP No. 03 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

PSAP No. 04 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Penelitian Terdahulu

1. Phispal (2011) dengan judul Analisis penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (studi kasus pada pemerintah kota Manado tahun 2009). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan

pemerintah kota Manado pada subbagian akuntansi dan pelaporan pemerintah kota Manado untuk laporan keuangan tahun anggaran 2009, dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado untuk tahun anggaran 2009 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Kema (2013) dengan judul Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan kota Manado sesuai dengan SAP. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan belum mengacu pada SAP tahun 2010, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado telah berpedoman pada SAP dengan menyajikan LRA, Neraca, LAK, dan CALK.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Priadana & Muis(2009:15) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus No. 69 Kota Manado provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yakni mulai bulan Desember 2014 sampai Januari 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian
2. Merumuskan masalah dan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai objek penelitian dan data berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
4. Menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif
5. Menarik kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran pada pemerintah dalam hal ini BPKBMD provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi lapangan ini yaitu studi dokumentasi, wawancara dan observasi/pengamatan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring informasi yang diperoleh secara keseluruhan dan detail, kemudian diuraikan untuk memperoleh gambaran yang jelas. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan pemerintah provinsi yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara secara geografis terletak pada $0^{\circ}15' - 5^{\circ}34'$ Lintang Utara dan $123^{\circ}07' - 127^{\circ}10'$ Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Laut Sulawesi, Republik Filipina, dan Lautan Pasifik. Sebelah Timur dengan laut Maluku. Sebelah Selatan dengan Teluk Tomini dan Sebelah Barat dengan Provinsi Gorontalo. Penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 berjumlah 2.366.272 jiwa. Secara administratif Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 5 kota yakni, Bolaang Mongondow, Minahasa, Sangihe, Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolmong Utara, Sitaro, Minahasa Tenggara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu.

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. BPKBMD mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
5. Menetapkan Surat Penyediaan Dana
6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
8. Menyajikan informasi keuangan daerah
9. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
10. Menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD
11. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Penyusunan laporan keuangan pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 masih menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (*cash towards accrual*) PP No. 24 Tahun 2005 sehingga laporan keuangan yang disajikan terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

Neraca merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir tahun anggaran. Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan mengumpulkan, menganalisis dan mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada pos pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara menjelaskan mengenai pendahuluan, ekonomi makro, kebijakan akuntansi yang penting dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pembahasan

Analisis Penyajian Neraca dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010

Penyajian neraca pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara masih berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005 yang mencakup pos-pos sebagai berikut.

1. Aset lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Aset tetap
4. Dana cadangan
5. Aset lainnya
6. Kewajiban jangka pendek
7. Kewajiban jangka panjang
8. Ekuitas dana lancar
9. Ekuitas dana investasi
10. Ekuitas dana cadangan.

Pemprov Sulut dalam tampilan neracanya tidak melakukan penyusutan pada aset tetap sehingga aset masih dicatat sebesar nilai perolehan. Hal ini tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 53 yang menyatakan bahwa aset tetap disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Neraca yang ditampilkan menjadi lebih saji (*overstated*) yang merujuk pada perilaku *window dressing*. Akibatnya tujuan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni ekonomi, efektivitas, dan terutama efisiensi tidak tercapai, sebab tampilan aset tetap pada neraca yang lebih saji ini pada hakikatnya mungkin memiliki aset tetap yang umur manfaatnya telah habis dan sudah tidak layak lagi digunakan oleh pemerintah. Dalam hal pengklasifikasian ekuitas secara terpisah menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas investasi dan ekuitas dana cadangan tidak sesuai dengan PSAP No. 1 ayat 84 dalam PP 71 tahun 2010 yang merangkum semua kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban menjadi Ekuitas.

Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 02 ayat 13 tahun 2010 sebagai berikut.

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit-LRA
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pembiayaan neto
7. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Tetapi karena basis akuntansi yang digunakan masih menganut kas menuju akrual (*cash towards accrual*), maka pengakuan pendapatan dan beban secara akrual belum diterapkan sehingga pemerintah provinsi Sulawesi Utara tidak menyajikan Laporan Operasional.

Analisis Penyajian Laporan Arus Kas dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas pemerintah provinsi Sulawesi Utara diklasifikasikan dalam empat komponen, yaitu:

1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
4. Arus kas dari aktivitas non anggaran.

Penyajian Laporan Arus Kas pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran tidak sesuai dengan klasifikasi PP No. 71 Tahun 2010 dalam PSAP No. 3 ayat 15 yang membagi informasi Laporan Arus Kas berdasarkan

aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris. Pos arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan belum sesuai dengan PSAP No.3 ayat 27 yang menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas tidak hanya untuk investasi aset tetap namun termasuk juga investasi lainnya yang terangkum dalam pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi.

Analisis Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010

Setiap entitas pelaporan wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang menjelaskan mengenai pendahuluan, ekonomi makro, kebijakan akuntansi yang penting dan penjelasan pos-pos laporan keuangan telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pemprov Sulut tidak melakukan penyusutan pada aset tetap sehingga aset masih dicatat sebesar nilai perolehan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 53 yang menyatakan bahwa aset tetap disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Pengklasifikasian ekuitas secara terpisah menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas investasi dan ekuitas dana cadangan tidak sesuai dengan PSAP No. 1 ayat 84 dalam PP 71 tahun 2010 yang merangkum semua kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban menjadi Ekuitas.
3. Penyajian Laporan Arus Kas pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran tidak sesuai dengan klasifikasi PSAP No. 3 ayat 15 yang membagi informasi Laporan Arus Kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris.
4. Secara keseluruhan penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, tetapi provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran 2015.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran selanjutnya hendaknya sudah berpedoman dan menerapkan SAP berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan menyajikan secara lengkap 7 laporan keuangan, yaitu Neraca, LRA, LAK, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, serta CALK agar laporan keuangan yang disajikan lebih efektif sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang akuntansi hendaknya ditingkatkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan mengadakan pelatihan-pelatihan secara rutin mengenai SAP berbasis akrual ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan peraturan terbaru dalam penelitian, sebab bidang akuntansi pemerintahan saat ini perkembangannya cukup pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, Pramono., Yanuar E. Restianto., Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kema, Ihwan. 2013. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewfile/2215/1722>. Diakses pada 17 Februari 2015. Hal. 771-781.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Keempat. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi., Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia, Bandung.
- Phispal, Fandy. 2011. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Manado Tahun 2009). *Skripsi (Tidak Dipublikasikan)*. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal. 1-6.
- Priadana, H. Moh. Sidik., Saludin Muis. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar* Buku 1. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

